

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut PKH), Program Keluarga Harapan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah dan rentan dan/atau individu. Setelah pusat data dan informasi kesejahteraan sosial mengolah data tersebut, maka rumah tangga yang berhak menerima PKH dapat diidentifikasi. PKH disebut sebagai bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT) di negara lain. Sebagai program bantuan bersyarat, PKH memberikan kesempatan kepada keluarga berpenghasilan rendah khususnya mereka yang memiliki ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan (faskes dan facdik) yang ada di lingkungan sekitar. Sesuai dengan mandat Presiden Navasita dan Konstitusi (Rosyasta, 2020)

Masalah kesejahteraan sosial saat ini semakin meningkat, salah satunya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang terjadi disaat keluarga atau seseorang yang hak-hak dasarnya tidak terpenuhi seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, akses kesehatan dan layanan social serta ketidkamampuan secara ekonomi. Apabila terdapat masyarakat yang hak-haknya tidak terpenuhi tersebut maka sudah menjadi sebuah kewajiban Negara berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. (Setiawan, 2017)

Karena kemiskinan telah lama ada dan masih menjadi permasalahan masyarakat Indonesia saat ini, maka kemiskinan merupakan permasalahan sosial

yang patut untuk terus diteliti. Namun seiring dengan kesulitan ekonomi yang terus dialami masyarakat Indonesia, gejala permasalahannya semakin parah. Kesejahteraan penduduk di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan negara maju karena status negara ini sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi rumah tangganya sendiri. Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. (Manongga & Dkk, 2018)

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah berupaya mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta memenuhi hak warga negara atas kebutuhan dasar melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta memberikan pelayanan. Pemerintah Indonesia menerapkan sejumlah inisiatif untuk memerangi kemiskinan di negara ini. Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan tunai bersyarat, pada tahun 2007 sebagai salah satu inisiatif khusus untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan yang dikenal juga dengan PKH merupakan program yang memberikan bantuan sosial

bersyarat kepada individu atau keluarga rentan dan tidak mampu yang terdaftar dalam program pendataan terpadu Pusat Data dan Informasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri. Kesejahteraan Sosial dan diakui sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan berupaya memperkuat sumber daya manusia, memutus siklus kemiskinan, dan mengubah perilaku yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok paling rentan. Tujuan ini terkait erat dengan inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tujuan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

Tabel 1. 1 Tingkat Kabupaten Miskin

No	Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kab/kota (persen)		
		2020	2021	2022
1	D.I Yogyakarta	12,28%	12,80%	11,34%
2	Kulonprogo	18,01%	16,38%	16,39%
3	Bantul	13,50%	14,04%	12,27%
4	Gunungkidul	17,07%	17,69%	15,86%
5	Sleman	8,12%	8,64%	7,74%
6	Yogyakarta	7,27%	7,64%	6,62%

Sumber: Data Bada Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten bantul memiliki jumlah penduduk miskin ketiga terendah ditahun 2022 kabupaten Bantul dengan jumlah (12,27%). Berdasarkan tabel BPS provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat bahwa kabupaten bantul setiap tahunnya masih mengalami naik turun. (yogyakarta.bps.go.id)

Beberapa hal yang menjadi faktor masyarakat miskin dikabupaten Bantul diantaranya terkait dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, pendidikan,

pendapatan yang tidak seimbang dengan kebutuhan hidup serta faktor ekonomi lainnya, dan masalah sosial masyarakat seperti masih terdapatnya masyarakat yang buta huruf, rendahnya tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pengetahuan yang rendah dalam mengikuti kemajuan dan perkembangan saat ini sehingga memerlukan bantuan dan penanganan dari pemerintah daerah.

Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2008. Ditinjau dari tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, Dinas Sosial mempunyai wewenang dalam ikut serta dalam tugas bidang sosial dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Situasi di daerah dan tugas bantuan ke daerah. Tugas-tugas ini termasuk merumuskan pelaksanaan kebijakan, mengembangkan norma, prosedur dan standar, memberikan bimbingan teknis dan pengawasan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan di bidang-bidang seperti perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. (*Program Keluarga Harapan Kab Bantul-TA-2022*, n.d.)

Salah satu program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah Program Keluarga Harapan, yaitu program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada rumah tangga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Keluarga penerima PKH berhak mendapatkan pelayanan di bidang bantuan sosial, pendampingan sosial, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam Program Keluarga Harapan berperan sebagai pelaksana program pemerintah dalam bentuk koordinator, pendamping, asisten pendamping sosial, dan administrator. Pendamping Program Keluarga

Harapan diberikan pemahaman tentang tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pendamping, yakni memiliki kewajiban melakukan pengawasan, dan memastikan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan juga bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima Program Keluarga Harapan di Lapangan.

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun cenderung naik turun. Penyaluran Bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara bertahap sebanyak empat kali setiap tahunnya. Persentase penyaluran program ini terkadang tidak mencapai 100% dikarenakan oleh data yang tidak valid, tidak ditemukan dan calon penerima bantuan telah meninggal. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH

No	Tahun	Jumlah KPM
1	2021	58,160 KPM
2	2022	57,742 KPM
3	2023	58,611 KPM

Sumber: Data Koordinator PKH Kabupaten

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak menerima bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Menurut LKPJ Tahun 2023 capaian kinerja sasaran meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani mencapai kategori berhasil, target dari 55%

terrealisasi 54%. Dalam proses mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial harus memberikan pelayanan terhadap PPKS. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial hanya terealisasi 99,26% dari 100%

Berkaitan dengan kinerja dinas sosial Kabupaten Bantul dalam pemerataan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat didalam implementasi PKH masih ditemukan berbagai permasalahan seperti Permasalahan dalam implentasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Kabupaten Bantul yaitu yang pertama Database terbatas dimana pemerintah kabupaten tidak bisa mendapatkan data penerima bansos karena hanya memiliki akses melihat di SIKS NG, sehingga sulit untuk melakukan Analisa data penerima PKH. Kedua, temuan yang tidak sesuai realita lapangan yang dimana pemadanan yang dilakukan PUSDATIN terkait pekerjaan yang tidak diperbolehkan menerima bansos. Ketiga, komponen tidak terbaca (*Non Eligible*) dimana data DAPODIK siswa yang tidak dapat disinkronkan dan atau perpindahan jejang yang sering bermasalah. Keempat, tidak ada pemeberintahuan/sosialisasi tentang kebijakan baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)”. Peneliti ingin mengetahui terkait bagaimana program ini dilaksanakan dan dapat ditingkatkan efektivitasnya dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui indicator penilaian efektivitas dan kinerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui Program keluarga Harapan (PKH)?
- 2) Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program pkh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai pada peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas kinerja dinas social kabupaten Bantul dalam mengatasi masalah Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial kabupaten Bantul dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi konsep keilmuan kebijakan publik pada instansi pemerintahan yang efektif khususnya Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Keluarga Harapan bagi warga nya sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, bahan informasi dan kontribusi pemikiran baik kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dalam mengevaluasi ukuran kinerja pemerintah. Serta mengetahui dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya pada masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan memberikan gambaran bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH).

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulisan dalam menganalisis bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 3 Tekssonomi Literature Review

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	(Rosyasta, 2020)	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)	Studi ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Perwosari memberikan bukti pencapaian tujuan yang dapat

			<p>diverifikasi. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerima PKH mengalami penurunan setiap tahunnya.</p>
2 2	(Saragi et al., 2021)	<p>Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampiran Parak.</p>	<p>Studi ini menunjukkan bahwa sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima program PKH. Namun implementasinya masih dihadapkan pada tantangan untuk mengumpulkan seluruh peserta sebulan sekali untuk pelatihan dan verifikasi.</p>
3 3	(Tribhuwana et al., 2019)	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kota Batu aman dan efektif karena Dinas Sosial Kota Batu</p>

			<p>menggunakan Pendamping PKH dalam matrikulasi, seminar, dan rapat koordinasi untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan.</p>
4 4	(Waruwu & Area, 2022)	<p>Analisis Kinerja Aparat Desa Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Ambukha Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat</p>	<p>Studi ini menunjukkan bahwa meskipun sejauh ini kinerja aparat desa dalam pelaksanaan PKH di Desa Ambukha sudah baik, namun kinerjanya belum sepenuhnya berjalan. berguna seperti yang diamati dari enam indikasi yang digunakan khususnya, prestasi pekerja, pengendalian diri, kecerdikan, kerja tim, kemampuan, dan akuntabilitas. Tantangan</p>

			tindakan aparat desa Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan PKH secara penuh masih belum mencukupi
5 5	(HUTABAR AT, 2022)	Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Kenanga Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	Berdasarkan penelitian ini, masih terdapat masyarakat mampu namun menerima bantuan PKH, masih terdapat dana bantuan yang tidak tersalurkan kepada penerima, dan kinerja aparat pemerintah dalam menyalurkan PKH belum membaik.
6 6	(Maulida Rachma, 2022)	Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin	Kajian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan internal dan eksternal yang perlu diatasi sebelum PKH dapat dilaksanakan guna

			meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di keluarga Pelambuan.
7 7	(Desrinelti et al., 2021)	Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan	Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang melaksanakan tujuan yang tercantum dalam keputusan kebijakan. Kegiatan ini dipengaruhi oleh empat faktor: struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi. Selain itu, terdapat aspek lain dalam proses implementasi kebijakan, seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

<p style="text-align: center;">8 8</p>	<p>(Ahyaruddin & Amrillah, 2018)</p>	<p>Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah</p>	<p>Studi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pencapaian kinerja nyata dibandingkan memandangnya sebagai formalitas untuk mendapatkan opini WTP dan mengabaikan kasus-kasus penipuan atau korupsi.</p>
<p style="text-align: center;">9 9</p>	<p>(Rulyanti et al., 2018)</p>	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening</p>	<p>Studi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pencapaian kinerja nyata dibandingkan memandangnya sebagai formalitas untuk mendapatkan opini WTP dan mengabaikan kasus-kasus penipuan atau korupsi.</p>
<p style="text-align: center;">1 10</p>	<p>(Maulida Rachma, 2022)</p>	<p>Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam</p>	<p>Pelaksanaan PKH dalam meningkatkan</p>

		Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin	kesejahteraan sosial di Kelurahan Pelambuan sudah berjalan efektif karena pada pelaksanaannya telah berhasil menjalankan indikator efektifitas program dan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan secara internal dan eksternal
--	--	---	---

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu berdasarkan tabel diatas adalah pada waktu dan lokasi penelitian yang mana penelitian ini lokasinya di Kabupaten Bantul yang tentu memiliki karakteristik berbeda serta dari teori yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja berbeda dari penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi sedangkan penulis menggunakan teori kinerja.

F. Kerangka Teori

Dari kajian ini, setidaknya ada empat jenis Teori yang digunakan dalam melihat permasalahan yang ada. Pertama adalah Kebijakan Publik. Kedua adalah Pengentasan Kemiskinan. Ketiga adalah Kinerja. Keempat adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Secara spesifik keempat teori tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

G. Kebijakan Publik

Intervensi pemerintah berbentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dapat mengendalikan kehidupan masyarakat secara sah dan otoritatif melalui kebijakan publik. Setiap kebijakan publik dibuat dengan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang teridentifikasi, dan implementasinya bertujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat yang muncul. Kebijakan publik berkaitan dengan pengguna, implementasi, dan evaluasi kebijakan dalam siklusnya. David Easton berpendapat bahwa karena kebijakan publik didasarkan pada serangkaian nilai, pemerintah tidak hanya merumuskan undang-undang tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat. Seperti David Easton, Harold Lasswell dan Abraham Kaplan percaya bahwa tujuan, nilai, dan praktik sosial harus dimasukkan ke dalam kebijakan publik. (Mustari, 2015: 10-11)

Perkembangan kebijakan publik dari waktu ke waktu berdampak pada cara para ilmuwan memahami kebijakan publik. Ada tiga era yang dapat dibedakan dalam evolusi bidang administrasi dan manajemen publik, sebagaimana dikemukakan oleh Osborne (2010). Awalnya, Old Public Administration (OPA) terjadi antara akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980. Kedua, pada akhir tahun 1980 hingga awal abad kedua puluh satu, muncul New Public Management (NPM). Ketiga, New Public Governance (NPG), yang diterapkan sejak akhir tahun 2010 hingga saat ini. (Sujarwoto, 2020: 12-16)

1. Kebijakan public di *era Old Public Administration* (OPA)

Pendekatan administrasi publik era ini sangat dipengaruhi oleh gagasan Max Weber tentang birokrasi. Meritokrasi dan hierarki adalah dua konsep panduan pendekatan birokrasi. Fitur model ini dijelaskan oleh Manning dan McCourt (2013).

Ciri-ciri tersebut antara lain pembagian wewenang antara politisi terpilih dan politisi, penunjukan eksekutif oleh eksekutif yang bertugas sebagai penegak aturan yang telah ditetapkan, dan pemilihan eksekutif berdasarkan profesionalisme dan senioritasnya. Ada birokrasi publik yang berkomitmen untuk melayani kepentingan publik daripada kepentingan swasta, pembagian kerja, hierarki, dan tugas, serta sumber daya yang dikendalikan oleh organisasi dan bukan oleh orang-orang yang bekerja di sana.

2. Kebijakan Publik di *Era New Public Management*

Contoh Kekurangan administrasi publik sebelumnya telah memunculkan manajemen publik baru. Menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi pasar yang sangat kompetitif. Meskipun motivasi utama penerapan pendekatan NPM adalah pengendalian biaya, pendekatan manajemen publik yang baru didasarkan pada konsep persaingan dan tata kelola sektor swasta. Komponen kunci dari NPM adalah penekanannya pada pengetahuan manajemen yang diperoleh dari sektor swasta. Jangan pisahkan kebijakan dari administrasi. Memperhatikan kepemimpinan yang berjiwa wirausaha pada organisasi pelayanan publik. Memperhatikan input dan output, penilaian dan pengendalian, audit, dan manajemen kinerja. Membedah pelayanan publik ke dalam komponen-komponennya yang paling mendasar, dengan memberikan perhatian khusus pada pengendalian biaya. Meningkatnya pemanfaatan pasar, persaingan, dan perjanjian distribusi sumber daya Sumber daya dan penyediaan layanan.

3. Kebijakan Publik di *Era New Public Governance*

Sejumlah pakar kebijakan publik kemudian mengklarifikasi bahwa kebijakan publik saat ini telah lepas dari konsep demokrasi deliberatif. Sebaliknya, demokrasi deliberatif berakar pada “ruang publik” yang dipopulerkan Habermas.

Setiap keputusan dalam demokrasi deliberatif harus merupakan hasil diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Tujuan: mencapai konsensus di antara penduduk. Partisipasi masyarakat inilah yang paling perlu dijelaskan dari definisi demokrasi deliberatif. Mengingat demokrasi deliberatif diadopsi melalui kebijakan publik yang deliberatif, terdapat pemahaman yang kuat tentang tipe komunitarian dalam perspektif kebijakan saat ini.

H. Pengentasan Kemiskinan

Kondisi alam dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta faktor budaya, semuanya dapat berkontribusi terhadap kemiskinan. Keterbatasan sumber daya alam dan manusia, peluang produksi yang relatif sedikit, dan ketidakmampuan memberikan kontribusi terhadap pembangunan merupakan penyebab utama kemiskinan baik secara alami maupun ekonomi. Ketimpangan dalam struktur kelembagaan, kebijakan pembangunan, dan hasil pembangunan menyebabkan kemiskinan struktural dan sosial. Kemiskinan budaya, di sisi lain, diakibatkan oleh keyakinan tentang standar hidup yang cukup dalam masyarakat. Baik di luar maupun di dalam komunitas miskin adalah sumber kemiskinan. Sikap pribadi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan contoh penyebab internal. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal seperti kelangkaan sumber daya alam, struktur sosial dan kelembagaan, kebijakan pembangunan, kurangnya kesempatan kerja, dan persaingan.

Berdasarkan pola temporalnya, dapat dibedakan dua kategori kemiskinan: (1) kemiskinan persisten, yang didefinisikan sebagai kemiskinan kronis atau kemiskinan yang diturunkan, mencakup wilayah di mana sumber daya alam sangat penting atau dilindungi; dan (2) kemiskinan siklis, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan siklus perekonomian secara umum. (3) Kemiskinan musiman,

khususnya yang dialami oleh petani dan nelayan yang bercocok tanam tanaman pangan. (4) Kemiskinan yang tidak disengaja, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau akibat suatu kebijakan.

Membandingkan kemiskinan dengan anggota masyarakat lainnya atau dengan ukuran tertentu juga dapat membantu membedakannya. Garis kemiskinan atau indikator kemiskinan lainnya digunakan untuk menghitung kemiskinan absolut. Sementara itu, kurva Lorentz digunakan untuk menghubungkan ukuran kemiskinan relatif dengan jumlah kelompok, dan besaran kemiringannya dapat diketahui dengan menggunakan rasio Gini. Terdapat tiga kategori indikator kemiskinan: Angka Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Rencana sepuluh tahun Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dimulai dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin.

Menurut Andre Bayo Ala (1981), Gunnar Adler Karlsson mengusulkan strategi berikut untuk mengurangi kemiskinan: (1) pendekatan jangka pendek memerlukan penyediaan sumber daya yang cukup untuk sejumlah besar masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, pengentasan kemiskinan melibatkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan distribusi pendapatan; dalam jangka panjang, hal ini melibatkan rencana untuk mendorong kemandirian lokal. Keuntungan jangka panjang melalui peningkatan dan penyempurnaan martabat kehidupan sosial dan pribadi. (kemenkeu.go.id)

I. Kinerja Pemerintah

Kinerja sebagai fungsi penggerak dan kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan. Seseorang perlu memiliki bakat dan kemauan tertentu. Tekad dan kompetensi seseorang tidak cukup untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang tujuan dan metodologi tugas tersebut. Kinerja adalah tingkah laku nyata yang ditunjukkan oleh setiap orang sebagai hasil prestasinya dalam bekerja, yang ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi. Efektivitas karyawan sangat penting untuk upaya pencapaian tujuan lembaga. Perencanaan untuk tujuan masa depan biasanya dilakukan oleh institusi berdasarkan perilaku yang mereka antisipasi akan ditunjukkan oleh semua anggota staf untuk mencapai tujuan tersebut. Produktivitas, kualitas, daya tanggap, tanggung jawab, dan akuntabilitas adalah lima indikator kinerja yang merupakan tujuan utama. (Wicaksana & Rachman, 2018)

Mengukur kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditentukan, yang pada akhirnya membantu lembaga mewujudkan visi dan misinya. Proses evaluasi kinerja organisasi pemerintah dalam kaitannya dengan tolok ukur persyaratan dasar pelayanan public disebut pengukuran kinerja.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada seberapa baik kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pertumbuhan dan kemandirian perekonomian suatu daerah dapat didukung oleh pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau sesuai dengan prinsip value

for money, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, daerah yang dinilai mempunyai kinerja keuangan yang baik adalah daerah yang mempunyai sumber keuangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. (Khikmah, 2016)

a. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menunjukkan seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apa tujuannya. Indikator kinerja menjelaskan apa yang diukur untuk memastikan apakah tujuan telah tercapai secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja harian organisasi menunjukkan kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, akan sulit bagi kami untuk mengevaluasi kinerja lembaga tanpa adanya indikator kinerja. Menurut Agus Dwiyanto dalam Pasalong (2019: 206–208), efektivitas birokrasi publik diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas

Hubungan antara input dan output merupakan pemahaman umum tentang produktivitas. Produktivitas mengukur tingkat efisiensi dan kemanjuran layanan yang diberikan.

2. Kualitas layanan

Ketika mengevaluasi kinerja organisasi layanan publik, kualitas layanan sangatlah penting. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik telah menimbulkan banyak persepsi yang

kurang baik terhadap organisasi tersebut. agar kepuasan publik dapat dijadikan sebagai standar untuk mengukur seberapa baik kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Kapasitas birokrasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membuat agenda dan prioritas pelayanan, serta membuat program pelayanan publik yang selaras dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, daya tanggap dalam konteks ini mengacu pada seberapa baik program dan upaya sukarela memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat lokal. Salah satu metrik kinerja yang digunakan untuk menilai kemampuan birokrasi publik dalam mencapai tujuan dan misinya khususnya dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat adalah daya tanggap.

4. Responsibilitas

Menjelaskan apakah kegiatan birokrasi publik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit, atau sejalan dengan prinsip administrasi yang sehat.

5. Akuntabilitas

berkaitan dengan sejauh mana masyarakat tunduk kepada pejabat politik yang dipilih oleh pemilih melalui kebijakan dan tindakan birokrasi. Sejauh mana kebijakan dan tindakan birokrasi publik mencerminkan kehendak masyarakat dapat ditentukan melalui akuntabilitas publik.

Kinerja merupakan gambaran derajat keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi suatu organisasi

yang tertuang dalam rumusan rencana strategis organisasi, menurut Indra Bastian dalam Irham Fahmi (2013:128). Menurut Indra Bastian, tujuan, sasaran, misi, dan visi suatu organisasi semuanya dapat digunakan untuk mengukur kinerja.

J. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang disebut juga PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan kemiskinan yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH, sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program. PKH disebut sebagai bantuan tunai bersyarat atau conditional cash transfer (CCT) di negara lain. Pedoman umum Program Keluarga Harapan PKH tahun 2012 menyebutkan bahwa PKH merupakan program yang membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya, RTSM harus memenuhi persyaratan terkait inisiatif untuk meningkatkan kualitas Manusia.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) salah satunya dipercepat oleh PKH. Lima komponen MDGs yang mendapat manfaat tidak langsung dari PKH adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya penduduk miskin dan kelaparan;
2. Pendidikan dasar;
3. Mengurangi angka kematian bayi dan balita;
4. Kesetaraan gender;

5. Mengurangi kematian ibu melahirkan.

Sebagai program bantuan bersyarat, PKH memperbolehkan keluarga berpenghasilan rendah, khususnya yang memiliki ibu hamil dan anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan (faskes dan fadik) yang ada di dekatnya. Dengan menjunjung tinggi taraf kesejahteraan sosial sesuai Amanat Konstitusi dan Nawacita Presiden RI, manfaat PKH juga mulai diperluas hingga mencakup lansia dan penyandang disabilitas.

Melalui PKH, Keluarga Sangat Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan dukungan, serta akses terhadap berbagai program perlindungan sosial pelengkap lainnya yang sedang berjalan. Tujuan PKH adalah menjadi titik fokus dan model pengentasan kemiskinan dengan menggabungkan elemen-elemen terbaik dari berbagai inisiatif perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada 3 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Komponen utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah verifikasi. Kegiatan verifikasi memastikan peserta mematuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Bagi keluarga yang tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, Program Keluarga Harapan (PKH) mengurangi bantuan tunainya. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menyadari bahwa untuk dapat menerima bantuan keuangan, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Komponen penting dari program ini adalah para peserta. Memahami tugas ini adalah langkah pertama menuju perubahan perilaku keluarga dan anggota di bidang kesehatan dan pendidikan.

3. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sadar bahwa mereka harus melengkapi sejumlah persyaratan agar bisa menerima bantuan keuangan. Komponen penting dari program ini adalah para peserta. Memahami tugas ini adalah langkah pertama menuju perubahan perilaku keluarga dan anggota di bidang kesehatan dan pendidikan.

Keluarga Sangat Miskin (KSM) dilayani oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Basis Data Terpadu memberikan informasi mengenai keluarga yang memenuhi setidaknya salah satu persyaratan berikut untuk dapat mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH), antara lain:

1. mempunyai anak balita atau ibu yang sedang hamil atau baru melahirkan;
2. Menjadi orang tua bagi anak usia prasekolah 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar;
3. Anak usia 7–12 tahun SD MI Paket A/SDLB; 4. Anak usia 12–15 tahun di SLTP/MTs/Paket B/SMLB;
5. Anak-anak penyandang disabilitas serta mereka yang berusia antara 15 dan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar;
6. memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dari pemerintah yang membuktikan keterlibatan Anda dalam PKH;



Gambar 1. 1 Kartu Keluarga Harapan

. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan penjelasan ringkas mengenai gagasan peneliti mengenai parameter suatu konsep. Definisi dan konsep penelitian berikut dapat ditentukan dalam hal ini:

- 1) Salah satu hal yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial adalah dengan menerapkan kebijakan publik. Pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat secara sah dan berwibawa melalui kebijakan publik. Setiap orang terikat pada kebijakan publik yang didasarkan pada aturan-aturan yang dituangkan dalam produk hukum.
- 2) Kumpulan inisiatif kemanusiaan dan ekonomi yang memungkinkan individu untuk keluar dari kemiskinan secara permanen dikenal sebagai pengentasan kemiskinan. Ada dua strategi: yang pertama adalah strategi jangka pendek dan melibatkan pemberian sumber daya yang cukup kepada masyarakat miskin dalam jumlah yang cukup. Jangka panjang dengan menumbuhkan otonomi daerah adalah yang kedua. Keuntungan jangka panjang melalui peningkatan dan penyempurnaan martabat

kehidupan sosial dan pribadi. Ada tiga jenis indikator kemiskinan: Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, dan Tingkat Keparahan Kemiskinan.

- 3) Hasil dari inisiatif dan program pemerintah yang akan atau telah selesai terkait dengan penggunaan dana dalam jumlah dan kualitas yang dapat diukur dikenal dengan istilah kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai alat manajemen untuk meningkatkan standar akuntabilitas dan pengambilan keputusan serta menentukan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agus Dwiyanto dalam Pasalong (2019: 206-208) menyebutkan lima indikator kinerja: produktivitas, kualitas layanan, daya tanggap, akuntabilitas, dan akuntabilitas.
- 4) Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat yang memungkinkan keluarga berpenghasilan rendah, khususnya yang memiliki ibu hamil dan anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan (faskes dan fadik) yang ada di dekatnya.

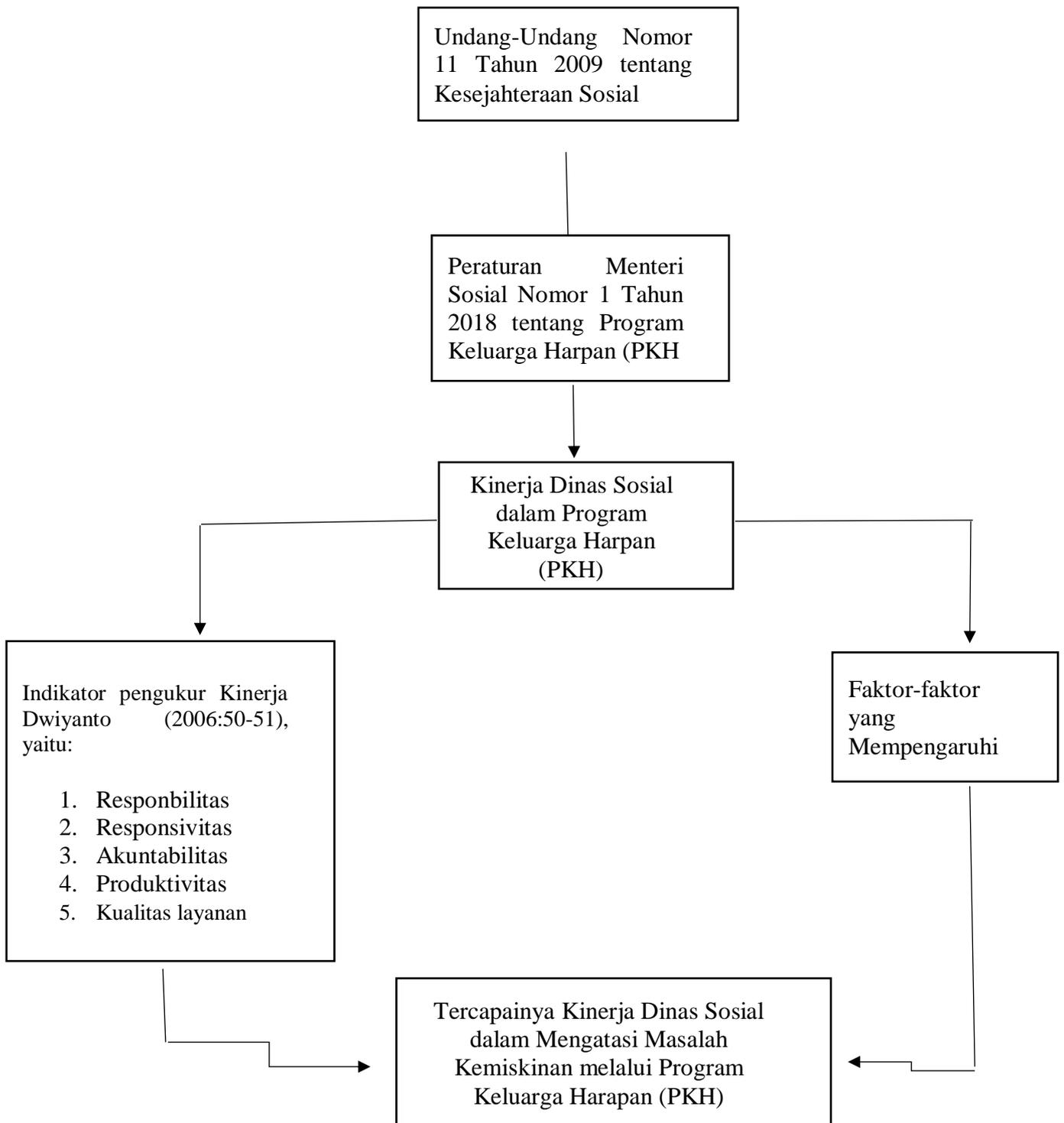
L. Definisi Operasional

Variabel, indikator, dan parameter yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini sebagian besar ditentukan oleh definisi operasional. Melalui resolusi operasional, peneliti dapat menggunakan fokus mereka saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan. Peneliti akan lebih mudah mengenali permasalahan dan menemukan solusi sebagai hasilnya. Para peneliti berkonsentrasi pada sumber kinerja berdasarkan analisis data, dengan menggunakan metrik berikut.

Tabel 1. 4 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Responibilitas2. Responsivitas3. Akuntabilitas4. Produktivitas5. Kualitas layanan	<ol style="list-style-type: none">1. a) Capaian tujuan, capaian program kegiatan, dan sasaran objek kegiatan. b) Sanksi atau teguran kepada peserta PKH.2. a) Kondisi keluarga. b) Susunan program dalam pelaksanaan PKH3. a) Jadwal evaluasi kegiatan PKH. b) Kegiatan setelah kegiatan PKH4. a) Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PKH. b) Penyaluran Dana KPM5. a) Tingkat komunikasi antar pihak penyelenggaradengan Masyarakat. b) Tingkat pemahaman SDM tentang PKH. c) Keluhan masyarakat selama program berlangsung.

M. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

N. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2018) mendefinisikan metode kualitatif sebagai proses menganalisis dan menguraikan makna perilaku individu maupun kelompok ketika menggambarkan masalah kemanusiaan atau sosial. menjelaskan dan menggambarkan bagaimana orang menafsirkan pengalaman mereka, sambil mencoba memahami apa yang mereka rasakan. Tema yang diselidiki dan dikumpulkan dari beragam data studi kasus, wawancara, observasi langsung, dan teks observasi digunakan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Deskriptif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan fenomena aktual dan faktual yang terjadi di lapangan, yang tidak hanya mengumpulkan data saja tetapi juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan, dengan demikian maka penelitian ini akan menjawab sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dalam melihat bagaimana efektivitas kinerja Dinas Sosial serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bantul.

2. Lokasi dan Obyek Penelitian

Tempat dimana penelitian akan dilakukan disebut dengan lokasi penelitian. Dinas Sosial Kabupaten Bantul menjadi lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Hal ini disebabkan Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan organisasi pelayanan masyarakat yang memberikan pelayanan dalam berbagai

bentuk yang berkaitan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, peneliti memilih dinas sosial sebagai lokasi penelitian dan menjadikan kinerja yang diberikan oleh dinas sosial Kabupaten Bantul sebagai titik fokus penelitian.

3. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi batasan-batasan kajian sehingga subjek kajian selanjutnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menghasilkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Penekanan penelitian ini meliputi :

1. Efektivitas Kinerja dinas social dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan di kabupaten Bantul. Dilihat dari beberapa dan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam Pasalong (2019: 206-208) digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Kinerja

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responbilitas
5. Akutanbilitas

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan di kabupaten Bantul.

4. Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Penelitian ini dalam penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2018) *purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan atas pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti.

Pengambilan informan dengan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan penelitian ini, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data dan informasi langsung dengan informan yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data primer ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada informan yang berkompeten dan memahami mengenai bagaimana kinerja dinas sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul. Adapun informan tersebut adalah:

- 1) Koordinator PKH Kabupaten Bantul.
- 2) Pendamping PKH
- 3) Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat

Alasan menggunakan informan-informan diatas adalah untuk mengetahui informasi terkait produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas, akuntabilitas, dan faktor- factor yang mempengaruhi kinerja dinas sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan serta untuk mendukung penelitian agar hasilnya tidak subjektif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri Sosial, buku, jurnal serta artikel yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang metodis dan seragam untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, seperti berikut ini:

- 1) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data tentang kegiatan yang sedang dan sedang berlangsung di lokasi penelitian melalui pengamatan langsung atau tidak langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bantul membantu Dinas Sosial dalam mengatasi permasalahan terkait masalah kemiskinan.
- 2) Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada sumber atau informan dan menerima jawaban langsung untuk memperoleh informasi. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur sebagai metode wawancaranya. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori wawancara mendalam yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, menurut Sugiyono (2018).

Pedoman wawancara pengelompokan topik penelitian selalu digunakan dalam proses wawancara semi terstruktur ini.

- 3) Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Analisis Data

Sugiyono (2018) mendefinisikan analisis data sebagai proses metodis untuk menemukan dan menggabungkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain untuk menciptakan hasil yang mudah dipahami dan dapat didistribusikan kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengelompokan informasi, memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesisnya, menyatukan semuanya ke dalam formula, memilih nama-nama penting yang dapat diselidiki lebih lanjut, dan sampai pada kesimpulan yang dapat didistribusikan kepada orang lain.

Teknik analisis yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman (2010:255) meliputi :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, informasi dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi, atau dengan menggabungkan ketiga metode tersebut (triangulasi). Selama tahap awal, peneliti melakukan observasi luas terhadap lingkungan sosial atau topik penyelidikan, mendokumentasikan semua observasi dan percakapan. Peneliti dapat mengumpulkan banyak data yang beragam dengan cara ini. Melalui proses pengumpulan data, peneliti dapat memastikan efektivitas Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dan apa saja aspek Program Keluarga

Harapan (PKH) Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap permasalahan kemiskinan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tren dan tema. Hal ini memudahkan proses pengumpulan data yang berkelanjutan dan menyajikan gambaran yang jelas selama tahap reduksi. Peneliti dapat menguraikan tema dan pola yang akan membantu memperoleh informasi tambahan mengenai efektivitas kinerja Dinas Sosial dan faktor apa saja yang mempengaruhinya dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bantul dengan merangkum dan memilih poin-poin penting dari penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data tersebut disusun secara tertulis dan berdasarkan fakta, dengan tujuan untuk memahami bagaimana perubahan kinerja dinas sosial dan apa pengaruhnya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bantul melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Data disajikan sebagai kumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan harus menyajikan informasi baru dan belum ditemukan sebelumnya. Hasilnya dapat berupa teori atau hipotesis, hubungan biasa atau interaktif, atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas. Untuk mencari informasi dalam penelitian yang dilakukan, proses penarikan

kesimpulan bertujuan untuk menganalisis informasi dan mencari makna dari data yang telah tersedia.